

THE ROLES OF SCHOOL COMMITTEE IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS IN YOGYAKARTA

Moch. Alip & Sunarto

Abstract

This research aimed at investigating the realization of the roles of school committee in vocational high schools in Yogyakarta Province as a means of reanalyzing its mechanism and roles. This study was a phenomenological study using the multi-site design chosen based on the consideration that there was no manipulation done to the research subjects and that the data were in the form of words, sentences, paragraphs and documents. Data were collected using interviews and document studies, and were analyzed inductively and continuously through data coding, classification and reduction. Research subjects consisted of members of the school committee from the four districts and municipality based on the information from the Ministry of National Education offices in the districts and municipality. Findings suggested that the selected members of the school committee were very active though they had not done all their roles optimally in terms of being advocates, supporters, controllers, and as mediators. Though the members of the school committee had been very active in supporting the school policy in raising fund, active in advocating the school, and fairly active in mediating the school and the DUDI, they were not very active in providing control and control mechanism. This condition was perhaps because the members of the committee were appointed and facilitated by the school principals so that they served more as supporters rather than as controllers.

Key words: *roles of school committee*

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN SMK DI DIY

Moch. Alip & Soenarto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali informasi tentang bagaimana realisasi peran Komite Sekolah SMK di DIY sebagai bahan kaji ulang mekanisme kerja dan peranannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif feno-menologis rancangan multisitus yang dipilih berdasarkan dua pertimbangan, yaitu: objek penelitian tidak dimanipulasi dan data berupa kata-kata, kalimat, paragraf, dan dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengkajian dokumen, kemudian dianalisis secara induktif dan terus-menerus, melalui penggolongan, klasifikasi, dan reduksi. Subjek adalah pengurus komite sekolah terbaik di setiap Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah terpilih sangat aktif, namun belum melaksanakan semua perannya secara optimal, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator. Komite sekolah nampak sangat aktif dalam mendukung kebijakan sekolah tentang pengumpulan dana sekolah, cukup aktif sebagai mediator antara sekolah dengan DUDI, dan aktif sebagai pemberi pertimbangan, namun kurang aktif sebagai badan pengontrol dan belum ada yang mengembangkan mekanisme kontrol. Kondisi demikian kemungkinan terjadi karena komite dibentuk dan difasilitasi oleh kepala sekolah serta pengurus komite adalah mantan pengurus badan pendukung penyelenggaraan pendidikan yang perannya memang sebagai badan pendukung.

Kata kunci: *peran komite sekolah*

Pendahuluan

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) memberi sekolah kewajiban dan kewenangan menyusun, mengelola dan melaksanakan program sendiri (Dit. PLP Dikdasmen. 2001). Penerapan MBS diikuti dengan pembentukan Komite Sekolah (Kep.Mendiknas No.044/U/2002) yang memiliki empat peran, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Penerapan MBS dan pembentukan komite sekolah adalah kebijakan baru sehingga masih ada perbedaan persepsi antarunsur terkait. Sebagai contoh, komite di suatu sekolah membubarkan diri karena berbeda pendapat dengan kepala sekolah tentang suatu masalah (Kedaulatan Rakyat, edisi 24-01-05). Lebih dari itu, belum banyak informasi tentang bagaimana realisasi peran komite sekolah serta sejauh mana tingkat keberhasilan dan hambatan yang dihadapinya. Perubahan sistem penyelenggaraan sekolah tersebut juga berdampak pada pola dan mekanisme pertanggungjawaban sekolah. Dengan demikian, penelitian pelaksanaan peran komite sekolah penting untuk dilakukan.

Lewis (1983) mengatakan "*Management as getting things done with people*". Kata *with*, bukan *through*, berarti lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat proses dari suatu tim. Menurut Hersey dan Blanchard (1982) manajemen adalah "*working with and through individuals and groups to accomplish organisational goals*", yaitu bekerja dengan dan melalui individu dan grup untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen diperlukan dalam suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan diwadahi dalam suatu organisasi. Cakupan kegiatan manajemen menurut Gibson (1996) terdiri dari empat fungsi, yaitu perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian.

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga memerlukan manajemen yang baik (Hoy and Miskel, 2005). Menurut Headington (2000), pembelajaran tidak bisa lepas dari *monitoring, assessment, recording, reporting, and accountability*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah akuntabilitas.

Laporan dibuat ke dalam dan ke luar. Laporan ke dalam berfungsi sebagai bahan evaluasi diri dan dasar perbaikan pada periode berikutnya. Laporan ke luar sebagai laporan akuntabilitas bukan sekedar hasil, tetapi disertai penjelasan mengapa bila gagal dan bagaimana pencapaiannya bila berhasil. Laporan akuntabilitas lembaga pendidikan juga disampaikan kepada badan pengatur (*governing body*) mewakili kepentingan orang tua siswa dan masyarakat (Headington, 2000).

Akuntabilitas program pendidikan adalah pencapaian tujuan dan mutu lulusan dilihat dari kemampuan riil (penguasaan substansi), bukan sekedar nilai yang tertulis dalam laporan. Secara formal rapor/transkrip nilai diperiksa pertama sebagai mutu lulusan, sedangkan penguasaan substansi akan diuji di lapangan. Perbedaan pendapat tentang kualitas bisa terjadi antara pengelola, pelaksana, pengguna lulusan, peserta didik, dan atau dengan masyarakat. Peningkatan mutu lulusan sebagai sasaran utama manajemen pendidikan dipengaruhi banyak faktor (World Bank, 1998).

Pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan layanan publik yang bertujuan membekali peserta keterampilan dasar dan khusus sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara produktif dan mampu mengadopsi teknologi baru dengan harapan mereka bisa memperoleh pekerjaan di industri atau melakukan usaha mandiri (Gasskov, 2000). Di Indonesia, pendidikan dan pelatihan kejuruan tingkat sekolah menengah (SMK) diselenggarakan berdasar UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 18, Ayat 3 dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah. Pada PP No. 29, Bab II Pasal 3 Ayat 2 dinyatakan bahwa SMK bertujuan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sifat profesional.

Rasional penyelenggaraan sekolah kejuruan adalah tidak semua lulusan SLTP dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya atau desakan ekonomi untuk segera bekerja, persaingan ke perguruan tinggi sangat berat dan tidak mungkin dicapai oleh semua lulusan sekolah umum (Nolker, 1983). Lulusan SLTA memerlukan dan berhak memperoleh keterampilan bidang tertentu yang dibutuhkan untuk diterima oleh pihak industri. Di sisi lain, sektor industri juga memerlukan tenaga kerja terampil untuk menjalankan bisnisnya

Tantangan yang dihadapi manajemen SMK adalah perubahan berbagai jenis lapangan kerja dan kualifikasinya. Tantangan tersebut cukup berat, bahkan sebagian ahli teknologi berpendapat bahwa pendidikan tenaga kerja siap pakai merupakan konsep yang tidak realistis mengingat teknologi berkembang sangat cepat sehingga tidak mungkin diikuti oleh SMK. Fasilitas praktik di SMK akan selalu ketinggalan dari yang dipakai oleh industri. Tantangan lain adalah pendapat ahli ekonomi bahwa penyelenggaraan sekolah kejuruan terlalu mahal dibandingkan nilai balikkannya (*rate of return*) yang relatif sama dengan sekolah umum.

Permasalahan lain adalah tidak semua lulusan pendidikan kejuruan terserap oleh lapangan kerja. Pada situasi ekonomi yang sedang surut seperti akhir-akhir ini banyak industri berhenti beroperasi sehingga permintaan tenaga kerja turun drastis, namun jumlah lulusan sekolah kejuruan tidak berkurang (Gasskov, 2000). Kurikulum sekolah kejuruan juga dinilai tidak responsif terhadap perubahan lapangan kerja yang terjadi di lapangan.

Kurikulum pendidikan kejuruan pada prinsipnya terdiri atas teori dan praktik. Proporsi kegiatan belajar praktik minimal 50% (Nolker, 1983). Untuk mengatasi masalah keterbatasan biaya dan fasilitas praktik, pemerintah Indonesia menerapkan konsep pendidikan sistem ganda yang sering disingkat PSG (Dit Dikmenjur, 1994). Sekolah hanya memberi bekal teori dan praktik dasar kejuruan. Praktik khusus dan lanjut menjadi tanggung jawab industri pasangan. Konsep ini sangat ideal, namun tidak semua industri bersedia menjadi mitra sekolah kejuruan dan daya tampung industri jauh lebih kecil dari jumlah praktikan.

Penerapan MBS diharapkan dapat meningkatkan keefektifan manajemen sekolah dan partisipasi tinggi masyarakat (Caldwell & Spinks, 1993; Odden, 1994; Winarno Surakhmad, 2000; dan Zamroni, 2000). Di Eropa dan USA, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan disalurkan melalui *board of education* dan *school councils* atau *school boards* (Caldwell & Spinks, 1993 dan Odden, 1994). *Board of education* dan *school councils*, secara normatif, menetapkan program pendidikan di daerah dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah/sekolah tentang pencapaian program pendidikan yang ditetapkan.

Sebagai pola baru, pelaksanaan MBS dan keterlibatan *board of education* dan *school councils* secara aktif masih perlu disempurnakan (Odden, 1994). Pelaksanaan MBS menuntut “pembentukan dewan manajemen sekolah yang mandiri beranggotakan guru, orang tua murid, pelajar, dan pejabat lokal” di samping “dewan teritorial pendidikan” (Zamroni, 2000). *School boards* adalah wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan/persekolahan. Permasalahan pendidikan terus berkembang dan berbeda antara daerah satu dengan yang lain sehingga *school boards* dan *school council* dituntut untuk bekerja secara kreatif.

Keberadaan dan mekanisme kerja *school council* masih terus dikembangkan (Odden, 1994). Keberadaan Komite Sekolah di Indonesia yang baru dibentuk tahun 2002 melalui Kep. Mendiknas No. 044/U/2002 sebagai konsekuensi penerapan MBS mulai tahun 2001 (Dir PLP Dikdasmen) perlu dikaji bagaimana wadah partisipasi masyarakat tersebut berperanserta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan bagaimana mekanisme kerjanya terkait dengan desentralisasi pendidikan setelah sekian lama pendidikan dikelola secara sentral.

Metode Penelitian

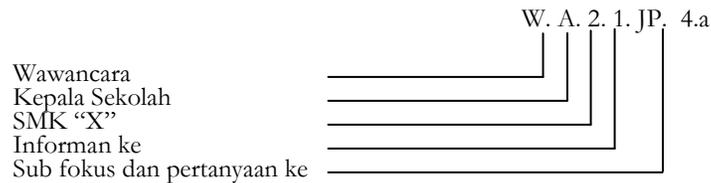
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi multisitus. Pendekatan kualitatif dipilih dengan rasional objek penelitian ini berupa fenomena sosial yang tidak dimanipulasi dan data yang diungkap berupa kata-kata, kalimat, dan dokumen (Bogdan & Biklen, 1998 dan Denzin & Lincoln, 1994). Rancangan studi multisitus dipilih untuk memperoleh informasi lengkap tentang pelaksanaan peran Komite Sekolah terpilih dari beberapa SMK di beberapa Kabupaten/Kota di DIY.

Subjek terpilih adalah komite sekolah terbaik pada SMK di setiap kabupaten/kota berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di DIY, yaitu Komite SMK N 1 Tempel Kabupaten Sleman, SMK N 1 Kodya Yogyakarta, SMK N 2 Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, SMK N 2 Bantul Kabupaten Bantul, dan SMK N 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. *Informan* kunci adalah ketua komite

sekolah dan kepala sekolah, sedangkan *informan* lain ditentukan berdasar hasil wawancara dengan ketua komite sekolah.

Peneliti hadir tanpa berperan serta dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap fenomena yang akan diungkap. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dalam situasi informal, pertanyaan bersifat terbuka, dan subjek menjawab secara bebas. Dengan demikian, fenomena yang terjadi adalah alami. Kalimat dan pernyataan *informan* divalidasi dengan sumber kedua dan dokumen terkait, yaitu bukti atau hasil pelaksanaan peran Komite Sekolah SMK terteliti. Supaya tidak ada kalimat yang tidak tercatat maka digunakan instrumen bantu *tape recorder*.

Transkrip wawancara dibaca oleh informan untuk menghindari salah ketik atau salah persepsi dan diketik ulang sebelum dimintakan tanda tangan informan. Dokumen terkait dikopi sebagai bahan analisis. Analisis data dilakukan secara terus-menerus, sejak awal pengumpulan data, kemudian diklasifikasi dan direduksi. Secara operasional, transkrip wawancara dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan subfokus penelitian dan sumbernya. Pemberian kode untuk memudahkan pelacakan data secara bolak-balik. Secara rinci, kode dibuat sesuai dengan teknik pemumpulan data, kelompok informan, dan lokasinya, seperti nampak dalam matrik berikut. Contoh penerapan kode dan cara membacanya:



Hasil dan Pembahasan

1. Umum

Informasi umum meliputi proses penyusunan komite sekolah, latar belakang ketua, dan program kerjanya. Proses penyusunan Komite Sekolah SMKN 1 Tempel Sleman dilakukan dengan membentuk formatur yang diketuai oleh Ketua Majelis Sekolah, seorang pengusaha. Formatur

menetapkan bahwa: (1) Komite Sekolah merupakan perubahan dari BP3, (2) Ketua BP3, seorang perangkat desa, diangkat menjadi Ketua Komite Sekolah, (3) Majelis Sekolah dipertahankan seperti penuturan seorang pengurus sebagai berikut.

BP3 diubah menjadi komite sekolah. ... majelis sekolah tetap ada tetapi masuk dalam struktur komite sekolah sebagai narasumber. Fungsi majelis sekolah adalah menjembatani sekolah dengan institusi pasangan, yaitu DUDI sebagai tempat praktik kerja industri, tempat OJT (W.S.1.JP.2.).

Dengan demikian, di SMKN 1 Tempel peran sebagai mediator antara sekolah dengan DUDI tetap dilakukan oleh Majelis Sekolah. Program kerja Komite Sekolah mencakup urusan organisasi, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar (PBM), dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) (W.K.1.JP.4.). Dalam bidang PBM, Ketua Majelis Sekolah juga sebagai guru tamu pada pembekalan siswa menjelang pemberangkatan ke Prakerin, misal tentang kewirausahaan dan materi lain yang terkait dengan DUDI (W.S.1.JP.3.).

Proses pembentukan Komite Sekolah di SMKN I Kodya Yogyakarta berbeda dari SMKN 1 Tempel. Komite dibentuk oleh pihak sekolah, seperti penuturan Sekretaris Komite Sekolah sebagai berikut: "... BP3 dan Majelis Sekolah berubah menjadi Komite Sekolah. Pada awal pembentukannya Komite Sekolah dibentuk oleh pihak sekolah ..." (W. S .2 .JP. 3.). Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa Ketua Komite adalah alumni SMEA yang sehari-hari bekerja pada perusahaan daerah (D.2.3). Program kerja Komite Sekolah SMKN 1 Kodya Yogyakarta juga lebih banyak berdasarkan masukan dari pihak sekolah (W. S.2. JP. 5.) yang mencakup lima hal sebagai berikut (W.K. 2 .JP.6.):

- (1) memberikan masukan terkait dengan RAPBS,
- (2) memonitor pelaksanaan kerja sekolah,
- (3) memonitor pelaksanaan RAPBS,
- (4) melaksanakan evaluasi bersama dengan pihak sekolah kegiatan sekolah, dan
- (5) membuat LPJ dana bantuan dari kabupaten dan provinsi.

Komite SMKN 2 Wonosari disusun melalui rapat kerja warga sekolah. Ketua terpilih adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) (D.3.1). Program utama Komite tahun 2005 adalah mendukung penerapan ISO: 9001: 2000 dan persiapan akreditasi sekolah. Dukungan diwujudkan dalam pengembangan sarana fisik (W.K.3.JP.1&2.).

Di Kabupaten Bantul lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dewan Sekolah bukan Komite Sekolah. Dewan Sekolah membawahi beberapa sekolah yang ada pada suatu wilayah kecamatan, namun keberadaan Majelis Sekolah di SMK dipertahankan. Dewan Sekolah Kecamatan Sewon, yang membawahi SMKN 1 Sewon, dipilih melalui rapat tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua siswa, pengusaha, dan pejabat dinas pendidikan. Ketua terpilih adalah seorang pengusaha restoran cukup ternama di Kota Yogyakarta.

Komite Sekolah SMKN 1 Pengasih Kulon Progo dibentuk oleh pihak sekolah dan sebagian personilnya direkrut dari pengurus BP3. Program Komite mengikuti program sekolah, seperti dinyatakan Ketua Komite sebagai berikut: "... Komite merupakan kelanjutan dari BP3. Saya semula Ketua BP3 kemudian menjadi Ketua Komite. Sekolah menunjuk personil yang duduk dalam kepengurusan Komite yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan orang tua siswa" (W.K.5.JP.1.).

2. Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan

Komite Sekolah SMKN 1 Tempel Sleman mengusulkan supaya guru serius menanamkan sikap disiplin dan sekolah menambah kriteria penerimaan siswa baru, yaitu tinggi badan minimal 150 cm karena banyak pengguna lulusan menerapkan syarat tersebut (W.A.1.JP.6.&7. dan W.S.1.JP.7). Untuk meningkatkan mutu lulusan, Komite juga mengusulkan supaya sekolah mengundang guru tamu dari DUDI (W. S. 1. JP. 7) dan menambah ekstrakurikuler berupa bahasa Mandarin dan Jepang (W.A.1. JP.2.). Majelis Sekolah menyampaikan beberapa masukan antara lain tentang pelaksanaan efisiensi penggunaan dana uji kompetensi dan waktu pertemuan Komite Sekolah seperti dikemukakan Ketua Majelis sebagai berikut:

“... untuk efisiensi dana, uji kompetensi dilaksanakan setiap akhir kelas III pertemuan Komite Sekolah dilakukan malam hari supaya bisa dihadiri semua pengurus” (W.K.M. 1.JP.3.&.6.).

Di SMKN 2 Wonosari Gunung Kidul, masukan Komite disampaikan kepada pengelola sekolah melalui rapat penyusunan program sekolah. Masukan yang pernah disampaikan antara lain tentang masalah akademik, yaitu perlunya pemantauan pada pelaksanaan Prakerin dan perlunya wawancara dalam seleksi penerimaan siswa baru. Masukan yang berkaitan dengan dana disampaikan pada saat penyusunan RAPBS, sebagai berikut “...Komite ikut membahas penyusunan RAPBS” (W.K.3 JP.3.).

Pada SMKN 1 Sewon, masukan Majelis Sekolah berkaitan dengan kurikulum dan anggaran disampaikan dalam rapat Majelis Sekolah (W.Wk.4.JP.6.). Kurikulum diharapkan sesuai dengan kebutuhan DUDI, seperti dikatakan Ketua dan Sekretaris Majelis Sekolah sebagai berikut: “... pengembangan kurikulum yang ada disesuaikan dengan usul dari dan DUDI” (W.K.4.JP.6.) dan “... agar siswa tidak bingung saat praktik di lapangan” (W.S.4.JP.9.). Masukan tentang anggaran disampaikan secara langsung pada saat penyusunan RAPBS.

Komentar Komite tentang kebijakan Kepala Sekolah SMK N 1 Pengasih relatif sama dengan komite sekolah lain, yaitu menyetujui RAPBS dan usulan iuran orang tua siswa yang diajukan kepala sekolah, bahkan Kepala Sekolah dinilai cukup berprestasi, seperti pernyataannya berikut ini: “Kepala Sekolah sangat bagus dalam mengelola sekolah, sehingga Komite sangat mendukung ...“ (W.K.5.JP.4.).

3. Komite Sekolah Sebagai Pendukung

Sebagai pendukung, Komite Sekolah SMKN 1 Tempel Sleman lebih banyak mengurus masalah pendanaan (W.B.1.JP.2. dan W.A.1 .JP.3.), seperti mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas dana pembangunan gedung.

BP3 diubah menjadi Komite Sekolah yang mewakili sekolah dengan orang tua siswa khususnya dalam hal pendanaan. (W.S.1.JP.2.).

“... Komite sekolah supaya lebih aktif mengali dana pengembangan sarana pendidikan, ...” (W.K.M. 1.JP.3.&.6.).

Majelis Sekolah menyampaikan beberapa masukan antara lain tentang pendanaan seperti dikemukakan Ketua Majelis sebagai berikut:

“... Komite sekolah supaya lebih aktif mengali dana pengembangan sarana pendidikan, ...” (W.K.M. 1.JP.3.&.6.).

Program kerja Dewan Sekolah Sewon berorientasi pada peningkatan mutu lulusan, namun secara operasional Dewan memfokuskan diri pada urusan dana untuk sarana sekolah, seperti pernyataan Ketua dan Sekretaris Dewan sebagai berikut: “Majelis Sekolah berperan dalam hal akademik dan menjembatani kerja sama sekolah dengan DUDI, sedang Dewan Sekolah berperan dalam hal mengupayakan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pendidikan dan latihan” (W.K.4.JP.5.) dan “Program Dewan Sekolah diarahkan untuk penyiapan pendanaan ...” (W.S.4.JP.4.).

Penerapan peran sebagai pendukung oleh komite terteliti lain relatif sama, dilihat dari adanya pendapat senada sebagai berikut. Ketua Komite SMK N 1 Pengasih menyatakan bahwa “... inisiatif kegiatan sepenuhnya dari sekolah. Komite menyetujui program yang memang sudah disusun dengan baik ...” (W.K.5.JP.3.). Ketua Komite SMK N 1 Kodya Yogyakarta menyatakan bahwa “...Komite Sekolah terlibat dalam penyusunan RAPBS sehingga ikut bertanggung jawab realisasinya” (W.K.2.JP.4.). Ketua Komite SMK N 2 Wonosari menyatakan bahwa “...pengurus Komite merasa bahwa sekolah memang tidak mungkin maju atau berkembang tanpa dukungan pihak lain, terutama dalam hal dana...” (W.K.3.JP.6.).

4. Komite Sekolah Sebagai Pengontrol

Sebagai pengontrol, Komite Sekolah SMKN 1 Tempel Sleman mengunjungi sekolah setiap empat bulan untuk memantau pelaksanaan program sekolah dan meminta pertanggungjawaban keuangan sekolah setiap akhir tahun (W.B.1.JP.6.). Majelis Sekolah memantau apakah DUDI serius dalam melaksanakan PSG dengan memberi pekerjaan siswa sebagai latihan (WA.1 .JP.7.). Dalam hal sarana dan prasarana, Komite turut

mengontrol pembangunan fisik, seperti dikemukakan Ketua sebagai berikut: “... pembangunan kantin kurang bagus, sehingga Komite meminta untuk dibongkar, diperbaiki ...” (W.K.1.JP. 5.) dan “... laporan pertanggungjawaban akademik sekolah tidak hanya disampaikan kepada Dinas Pendidikan tetapi juga kepada Komite Sekolah, ...untuk itu Komite Sekolah harus bermutu” (W.K.1.JP.6.).

Dalam perannya sebagai pengontrol, Komite Sekolah SMKN I Kodya Yogyakarta turut memantau PBM dan turut menyusun RAPBS. Komite Sekolah SMKN 2 Wonosari memeriksa laporan keuangan sekolah setahun sekali, seperti diungkapkan ketuanya sebagai berikut “...Komite ikut mencermati laporan keuangan sebelum disampaikan dalam rapat...” (W.K.3.JP.4.). Kontrol yang dilakukan Dewan Sekolah Sewon Bantul lebih berorientasi pada masalah keuangan, sedangkan kontrol masalah akademik dilakukan oleh Majelis Sekolah, seperti dinyatakan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Sekolah sebagai berikut: “... memantau sejauh mana pelaksanaan program ...” (W.K.4.JP.7.) dan “... minta pertanggungjawaban tentang pencapaian kompetensi peserta didik ...” (W.Wk.4.JP.6.).

Peran kontrol Komite Sekolah SMKN 1 Pengasih dilakukan dengan menghadiri rapat pertanggungjawaban sekolah setiap akhir tahun, seperti pernyataan ketua Komite berikut ini: “ ... setiap akhir tahun anggaran, sekolah melaporkan dan komite melihat laporan maupun rencana anggarannya, untuk laporan bulanan belum ada ...” (W.K.5.JP.5.) dan pernyataan wakil ketua Komite sebagai berikut “...sekolah selalu membuat laporan dengan baik” (W.Wk.5JP.8).

5. Komite Sekolah Sebagai Mediator

Di SMKN 1 Tempel, peran sebagai mediator sekolah dengan pihak DUDI banyak dilakukan oleh Majelis Sekolah, seperti dikatakan ketua Komite Sekolah sebagai berikut: “...Majelis Sekolah membantu menghubungi pengusaha supaya bersedia menerima siswa praktik” dan “...bersedia menerima lulusan SMKN 1 Tempel sebagai karyawan baru (WA.1.JP.5. & W.K.1.JP.8). Mediasi sekolah dengan orang tua siswa dalam hal penggalangan dana dilakukan oleh komite sekolah, seperti dinyatakan

anggota komite sebagai berikut: "...Pengurus komite ikut menjelaskan program-program sekolah yang memerlukan dukungan dana..." (W.A.1.JP.3.).

Peran sebagai mediator dilakukan Komite SMK N 1 Kodya Yogyakarta dengan mendekati sekolah ke masyarakat dan menghadirkan pihak DUDI ke sekolah dalam persiapan Prakerin, seperti pernyataan Ketua berikut ini: "... melalui berbagai kesempatan kami menyampaikan informasi bahwa ada fasilitas sekolah yang dapat dipakai oleh warga sekitar..." dan "...menghubungi beberapa teman usaha untuk memberi ceramah dalam persiapan Prakerin (W. S.2.JP.9. dan W. S. 2.JP. 10.). Komite SMKN 2 Wonosari melakukan kegiatan sejenis, yaitu:

"...kami membantu sekolah berpartisipasi dalam pameran pembangunan guna memperkenalkan program sekolah kepada masyarakat" dan "Komite juga berkonsultasi dengan pihak DUDI tentang kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan supaya materi praktik sesuai dengan kebutuhan DUDI dengan harapan lulusan dapat segera terserap oleh DUDI" (W.K.3.JP.6.&7.).

Di SMKN 1 Sewon, peran sebagai mediator antara pihak sekolah dengan pihak luar dilakukan oleh majelis sekolah. Majelis berpartisipasi aktif dengan menghubungi perusahaan sebagai tempat Prakerin (W.K.4.JP.3.).

Bentuk pelaksanaan peran sebagai mediator oleh Komite SMKN 1 Pengasih sedikit berbeda dari komite di sekolah lain, yaitu dengan membuka bursa kerja bagi lulusan seperti dinyatakan Ketua dan Wakilnya sebagai berikut: "... Komite Sekolah mengadakan bursa kerja dan kerja sama dengan pengusaha lain untuk menyalurkan lulusan, baik di dalam maupun di luar DIY" dan "Penyaluran dan penyuluhan tenaga kerja,... Kalau komite membutuhkan tenaga kerja mengutamakan lulusan SMKN 1 Pengasih" (W.K,5.JP.4. dan W. Wk. 5 .JP. 10.). Komite juga memperhatikan hak siswa dan mencermati bila ada kesalahan penilaian pada uji kompetensi, seperti pernyataan Wakil Ketua Komite sebagai berikut: "Komite memberikan apresiasi bagaimana cara menilai secara benar kepada DUDI agar siswa tidak dirugikan" (W.Wk.5.JP. 10.).

6. Pembahasan

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan relatif sama antarkomite sekolah terteliti. Pertimbangan yang disampaikan paling banyak terkait dengan dana, terutama bagaimana cara menggalang dana dari orang tua siswa. Masukan lain yang juga dilakukan oleh semua komite terteliti adalah terkait dengan praktik kerja industri dan kompetensi lulusan, namun belum ada masukan mendasar tentang standar mutu atau kompetensi lulusan. Aspek lain yang disebut oleh sebagian komite terteliti adalah tentang kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, dan pembentukan sikap, khususnya tentang disiplin. Jadi, aspek pendanaan mendominasi perhatian komite sekolah.

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan juga relatif sama antarkomite terteliti. Dukungan nampak sangat menonjol dalam menyusun dan menetapkan rencana anggaran belanja sekolah (RABS), terutama dalam menggalang dana dari orang tua siswa. Nampak adanya kecenderungan bahwa komite dibentuk dan difasilitasi oleh kepala sekolah sehingga wajar bila peran paling menonjol adalah sebagai badan pendukung kebijakan pengelola sekolah. Kuatnya dukungan komite terhadap kebijakan sekolah mungkin ada hubungannya dengan jati diri komite yang merupakan alih fungsi atau alih nama dari BP3.

Kuatnya dukungan komite terhadap kebijakan pengelola sekolah sebenarnya baik selama tidak mengurangi perannya yang lain. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa komite sekolah terteliti kurang optimal dalam melakukan perannya sebagai badan kontrol. Tidak terungkap adanya komentar negatif dari komite terhadap isi laporan pertanggungjawaban sekolah, baik dalam hal pencapaian mutu dan serapan lulusan maupun penggunaan dana sekolah. Tidak terungkap pula ada pembahasan berkepanjangan, apalagi penolakan, tentang RAPBS karena komite terlibat dalam penyusunannya. Wawancara mengungkap informasi sebaliknya, komite sekolah justru menerima banyak masukan dari kepala sekolah dalam menyusun programnya. Lemahnya pelaksanaan peran komite sebagai badan kontrol mungkin juga terkait dengan adanya pertentangan peran komite sekolah sebagai badan pendukung.

Peran komite sekolah sebagai mediator sekolah dengan masyarakat, khususnya DUDI, terlaksana secara baik ditinjau dari kepentingan siswa, DUDI, maupun sekolah. Kualitas pelaksanaan peran komite sekolah tersebut nampaknya berkaitan dengan proses pembentukan komite yang dilakukan oleh kepala sekolah dan latar belakang pengurus, terutama ketuanya, yang berstatus sebagai pengusaha atau orang tua siswa.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran komite sekolah paling menonjol sebagai badan pendukung dan paling lemah sebagai badan kontrol. Kondisi demikian mungkin ada hubungannya dengan kenyataan bahwa pengurus komite sekolah terteliti adalah mantan pengurus BP3 yang seperti namanya memang berperan sebagai badan pendukung dan Komite sekolah terteliti dibentuk dan difasilitasi oleh kepala/pengelola sekolah.

Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pelaksanaan peran komite sekolah sebagai badan kontrol bila komite tidak dibentuk oleh kepala sekolah tetapi dibentuk oleh masyarakat dan bukan hasil alih nama atau alih fungsi dari BP3. Perlu diteliti pula hubungan antara kuatnya peran komite sebagai pendukung dengan lemahnya badan kontrol.

Daftar Pustaka

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research*. Needham Height, MA: Allyn & Bacon.
- Caldwell, J. B. & Spink, M. J. (1993). *Leading the self-managing school*. London: Falmer.
- Gasskov, V. (2000). *Managing Vocational Training System*. Geneva. ILO.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H.(JR). (1995). *Organisasi*. Alih bahasa Adiarni. N. 1996. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Headington, M. (2000). *Monitoring, Assessment, recording, reporting, and accountability*. London: David Fulton.

- Hersey, P., & Blanchard, K. (1982). *Management of Organizational Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hoy, W. K. and Miskel, C. G. (2005). *Educational administration: theory, research, and practice*. New York: McGraw-Hill
- Dit Dikmenjur Dikdasmen. (1997). *Skills toward 2020 for global era*. Jakarta: Depdiknas
- Dit PLP Dikdasmen. (2001). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Lewis, J.(JR). (1983). *Long-Range and Short-Range Planning for educational Administrator*. Newton, MA: Allyn and bacon.
- Nolker, H. (1983). *Pendidikan Kejuruan: Pengajaran, Kurikulum, Perencanaan*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno Surakhmad. (2000). *Pendidikan berbasis masyarakat sebagai wujud otonomi dalam pendidikan*. Makalah Semiloka Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan, di UNY, 17 Februari 2000.
- World Bank. (1998). *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*. World Bank.
- Zamroni. (2000). *Paradigma pendidikan masa depan*. Yogyakarta: Bigraf

Biodata

Moch Alip. Lahir di Kulon Progo, 14 Maret 1952. Pekerjaan staf pengajar S1 Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY, Th 1978 s.d. sekarang, dan S2 Prodi Manajemen Pendidikan PPs UNY, Th 2003 s.d. sekarang.

Penulis Modul dan Penatar:

- a. Perubahan, Kepala Sekolah SMK se-Jawa Tengah dan DIY, Th. 2005.
- b. Asesmen Berbasis Kompetensi, Dosen LPTK se Indonesia, Th 2005 - 2007

Penelitian yang dianggap paling menonjol: Akuntabilitas Pendidikan Guru Kejuruan, Th 2003.

Soenarto. Lahir di Sleman, 04 Agustus 1948. Pekerjaan sebagai pengajar S1 FT UNY dan Program Pascasarjana UNY. Email: soenarto@uny.ac.id.

Pendidikan yang pernah diikuti:

- a. S1 Pendidikan Teknik Listrik, IKIP Yogyakarta, tahun 1974.
- b. Certificate in Teaching Methodology, Technical teacher college, College of Higher Education, London, 1978.
- c. S2 Industrial Vocational Education, State University of New York, 1984.
- d. S2 Education Program Evaluation, Ohio State University, USA, 1987.
- e. S3 Industrial Vocational Education, Ohio State University, USA, 1998.

Pengalaman penelitian:

1. Retrospek dan prospek pendidikan kejuruan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNY, 2003.
2. Dampak bantuan *Matching Grant* terhadap peningkatan mutu pendidikan SLTP di DIY, Dinas Pendidikan DIY, 2004.
3. Monitoring dampak pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, Dinas Pendidikan DIY, 2005.
4. Monitoring dampak pelatihan MGMP terintegrasi berbasis kompetensi, Dinas Pendidikan DIY, 2005.